Dua Sisi Proses Penyelesaian Sengketa: Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu

Ujang Abidin, Dulnasir

STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia

ujangabidin2302@gmail.com; adv.dulnasir@gmail.com

Informasi artikel

Kata kunci:

Penyelesaian
Sengketa,
Bawaslu Purwakarta,
Pencoretan DCT

ABSTRAK

Sesuai amanat regulasi, penyelesaian sengketa proses pilkada dan pemilu diemban oleh lembaga pengawas dan penegak keadilan pemilu yaitu Bawaslu. Peran Bawaslu yang begitu sentral menjadi harapan dalam menjaga keadilan pilkada maupun pemilu. Penulisan artikel ini akan difokuskan pada perbandingan proses penyelesaian sengketa pada Pilkada Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019. Dua kasus sengketa dalam momentum yang berbeda tersebut menjadikan proses pencarian keadilan hukum dalam kontestasi politik menjadi hal yang patut untuk disoroti. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan studi kasus dilakukan di Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa dalam pilkada dan pemilu yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpedoman pada regulasi dan fakta hukum yang ada dalam persidangan. Pasangan Rustandi dan Dikdik sebagai bakal calon bupati yang ditolak permohonannya oleh KPU serta Angga dan Lukmanul Hakim calon Anggota DPRD yang dicoret dari DCT oleh KPU juga merupakan proses hukum yang disikapi oleh Bawaslu untuk membuat sebuah putusan yang menjunjung tinggi rasa keadilan.

ABSTRACT

Keywords:

Dispute Resolution,
Purwakarta Bawaslu,
DCT Deletion

Two Sides of the Dispute Resolution Process: Efforts to Realize General Election Justice. In accordance with the mandate of law, the dispute resolution of the regional head election and general election processes is carried out by the supervisory agency and election justice enforcement agency, namely Bawaslu (The General Election Supervisory Agency). The role of Bawaslu which is so central is the hope in maintaining the regional head election and general election justice. The writing of this article will focus on the comparison of the dispute resolution process in the 2018 Purwakarta Regional Elections and the 2019 Simultaneous general elections. The two dispute cases in different momentum make the process of seeking legal justice in political contestation worthy of attention. The type of research in this article is normative juridical law research with a case study conducted at Bawaslu, Purwakarta Regency, West Java Province. The results of the study can be concluded that the dispute resolution process in the regional head election and general election that occurred in the Bawaslu of Purwakarta Regency was guided by the regulations and legal facts in the trial. The pair of Rustandi and Dikdik as candidates for regent whose application was rejected by the KPU and Angga and Lukmanul Hakim as candidates for DPRD (The Regional People's Representative Assembly) members who were removed from DCT (Permanent Candidate List) by the KPU (The General Elections Commission) were also a legal process that was addressed by Bawaslu to make a decision that upholds a sense of justice.

Copyright © 2022 (Ujang Abidin dan Dulnasir). DOI: <https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.04>

Naskah diterima: 21 Juni 2022, direvisi: 27 Juli 2022, disetujui: 30 Juli 2022

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan. Dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kepastian hukum yang merupakan salah satu variabel penting, dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat keadilan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat keadilan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut sebagaimana menurut Syarbaini yang mengatakan bahwa, semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu. (Syarbaini, dkk, 2002:80)

Dalam setiap perhelatan pemilu, persetujuan antar peserta pemilu ataupun peserta pemilu dengan penyelenggara, membuat pemilu menjadi ajang pertarungan keadilan yang harus dirasakan semua pihak. Perbedaan kepentingan dalam pemilu menjadi hal yang lumrah, maka hal tersebut berpotensi terjadi konflik antar peserta pemilu atau juga dengan penyelenggara pemilu yang hanya bisa diselesaikan secara hukum. Bawaslu Kabupaten/Kota (sebelumnya bernama Panwaslu Kabupaten/Kota) bertindak sebagai pengawas pemilu juga berperan sebagai penegak keadilan pemilu. Regulasi yang mengatur ketika terjadi sengketa proses pilkada dan pemilu harus dijadikan pijakan demi mampu menghadirkan keadilan bagi peserta pemilu, penyelenggara (KPU), dan khalayak secara umum.

Terjadinya sebuah sengketa karena adanya perselisihan atau pertentangan adalah konsekuensi logis dari adanya kompetisi perebutan kekuasaan. Perselisihan sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sengketa bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang dialami oleh perorangan atau kelompok. Menurut Witanto, “sengketa adalah konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atau suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.” (Witanto, 2011:2)

Maka dari itu perlu ada sebuah proses peradilan yang dapat diakses secara mudah dengan tetap menjunjung tinggi keadilan. Kesederhanaan proses penyelesaian sengketa pemilu tidak hanya terletak pada hukum acara atau prosedural saja, tetapi juga terkait dengan substansi pengaturan setiap tahapan pemilu yang jelas sebagai tolok ukur dalam

menilai setiap materi gugatan dan pembuktian (Firdaus, 2014:211). Maka penting mendudukkan sebuah perkara dalam kerangka regulasi tidak boleh ditawar-tawar lagi.

Sengketa proses sebagaimana yang dimaksud di atas, pernah terjadi di Kabupaten Purwakarta ketika pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Regulasi yang cukup berbeda antara Pilkada dan Pemilu dalam menyelesaikan sengketa menjadi menarik untuk dikaji. Seperti proses persidangan yang dilaksanakan terbuka dan tertutup dan juga soal kehadiran pihak yang terlibat dalam kasus hingga putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta.

Pencalonan salah satu pasangan calon yang tidak diterima oleh KPU Kabupaten Purwakarta menjadi sengketa proses pertama yang ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Purwakarta (sebelum berubah menjadi Bawaslu). Ketika itu, terjadi dua surat rekomendasi yang mengusung dua pasangan calon oleh Partai Hanura dan menimbulkan konflik yang melibatkan KPU, Panwaslu hingga PTUN.

Berbeda dengan Pilkada, kasus pada Pemilu 2019 terjadi akibat dicoretnya dua calon legislatif DPRD Kabupaten yang masing-masing berasal dari Partai PKB dan Partai Berkarya oleh KPU Purwakarta, karena dianggap telah terjadi pemalsuan keterangan oleh dua calon legislatif yang bersangkutan. Persoalan tersebut dibawa ke meja persidangan Bawaslu dan membuat dua calon legislatif tetap tidak boleh mengikuti pencalonan legislatif. Melihat dua persoalan hukum dalam 2 perhelatan politik yang berbeda tersebut, maka perlu sebuah sistem keadilan pemilu yang berimplikasi pada pembangunan sarana dan tindakan untuk mencegah terjadi sengketa pemilu. Adapun sarana dan tindakan yang perlu diambil dalam upaya mencegah terjadinya sengketa pemilu bisa berasal dari luar sistem keadilan pemilu bisa dari dalam sistem keadilan pemilu. Tindakan dan sarana yang berasal dari luar sistem keadilan pemilu meliputi: *Pertama*. Merancang dan mengimplementasikan kerangka konstitusional dan hukum yang tepat untuk demokrasi, dan pemerintah perwakilan, hak asasi manusia dan proses pemilu; *Kedua*. Partisipasi partai-partai politik utama dan sektor-sektor kunci masyarakat dalam merancang atau mereformasi kerangka hukum pemilu; *Ketiga*. Pengembangan budaya politik dan pendidikan kewarganegaraan, termasuk prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai dan menghormati aturan hukum dan hak asasi manusia; Kedudukan lembaga pengawas dan penegak keadilan pilkada dan pemilu, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Purwakarta akan dibahas dengan melihat konflik yang terjadi dan

upaya apa saja yang dilakukan yang tertuang dalam sebuah putusan. Karena sebagaimana diketahui, sebuah putusan pasti akan diterima atau ditolak sebagian oleh pihak yang berperkara, tak terkecuali dalam kasus yang terjadi pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Oleh sebab itu, artikel ini menyuguhkan sudut pandang perbandingan antara sengketa ketika Pilkada dan Pemilu dilihat dari putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta. Analisis putusan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembahasan yang disajikan. Karena perlu ditekankan, upaya Bawaslu Kabupaten Purwakarta dalam menegakkan keadilan pemilu selama dua momentum tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari sisi baik dan sisi kekurangannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Waluyo, 1991:6). Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan studi kasus dilakukan di Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.

Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto, 2003:1). Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Suatu Penelitian Yuridis Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Soeparmoko, 1991:1). Pendekatan yang dilakukan secara *researchable* yang nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang jelas dalam bidang profesi atau bidang ilmu yang akan diteliti. (Sugono, 2006:107)

C. PEMBAHASAN

Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang merupakan inti dari sistem keadilan pemilu, memiliki dua fungsi yang utama yakni korektif dan punitif. Tindakan korektif ditujukan untuk menangani keberatan-keberatan pemilu yang bertujuan untuk pembatalan atau modifikasi atau mengakui setiap penyimpangan tindakan pemilu, dan memberikan perlindungan hak-hak pemilu atau memulihkan dan memenuhi hak pemilu yang dilanggar. Ali

Achmat berpendapat dalam Hardi Munte, bahwa sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.” (Munte, 2017: 3)

Menurut Mujahidin, alasan lain yang mendorong penyelesaian diselesaikan di lembaga yang berkompeten yaitu: *pertama*, terlalu banyak institusi yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum pemilu, ada bawaslu, kepolisian, kejaksaan, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, Pengadilan yang ada ternyata memiliki keterbatasan untuk menyidangkan sengketa pemilu tertentu, baik karena hukum acaranya yang tidak dapat mengikuti proses pemilu/pemilukada yang terikat pada tahapan-tahapan waktu maupun karena keterbatasan lingkup kewenangan. *Ketiga*, Dengan begitu banyaknya mekanisme dan institusi yang terlibat, hampir semua pencari keadilan tidak dapat memulihkan hak mereka yang terlanggar (Mujahidin).

Diperkuatnya kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mana lingkup dari pemantauan juga mencakup kewenangan represif yaitu menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum dan keputusannya bersifat *final and binding* merupakan salah satu perubahan signifikan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Hamimah, 2018: 803). Tentu saja dengan adanya penguatan kewenangan atas Badan Pengawas Pemilihan Umum, memperlihatkan ada kenaikan kadar demokrasi yang membuat penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia mendekati asasnya yaitu LUBERJURDIL (Febriadi, 2018: 47). Maka bisa dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu adalah terjadinya sebuah perselisihan dari orang ataupun kelompok yang merasa dirugikan dalam proses pemilu untuk mengatasi sebuah permasalahan lewat jalur-jalur yang telah disediakan. Jadi, pengertian dari sengketa pemilu adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama proses pemilu oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu yang akan mempengaruhi hasil pemilu sebagai landasan untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang terkait

Dalam pembahasan di bawah ini akan berfokus pada menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Purwakarta dan Bawaslu Kabupaten Purwakarta. Pembahasan akan diawali penyelesaian sengketa Pilkada tahun 2018 yang ditolak pencalonannya oleh KPU Kabupaten Purwakarta. Kemudian penyelesaian sengketa Pemilu tahun

2019 yang dicoret oleh KPU Kabupaten Purwakarta dua calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang sudah tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dari dua partai politik yang berbeda. Terakhir, akan dipaparkan mengenai upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta dalam menegakkan keadilan pemilu dalam dua kasus penyelesaian sengketa tersebut.

Dua putusan yang memiliki konteks yang berbeda dipayungi oleh regulasi yang berbeda pula. Ada perbedaan dalam metode dan tata cara mengenai proses penyelesaiannya. Sementara itu, penyelesaian sengketa pada Pilkada tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 memiliki kesamaan dalam subjek pemohon dan termohon, yaitu sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara dalam hal ini surat keputusan KPU Kabupaten Purwakarta. Disinilah posisi Bawaslu dalam memutus perkara yang terjadi dalam mewujudkan keadilan pemilu.

Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi kelembagaan yang menjadikan Bawaslu memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi peradilan. Kedua fungsi tersebut pada saat yang sama dijalankan secara beriringan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan konstelasi politik di Indonesia. Di satu sisi mengawasi dengan temuannya dan di sisi yang lain menerima setiap laporan yang diajukan oleh pihak yang tercantum dalam regulasi.

1. Proses Penyelesaian Sengketa: Regulasi dalam Pilkada dan Pemilu

Aturan penyelesaian sengketa proses pemilu memiliki dua kamar yang berbeda, yaitu pilkada dan pemilu. Bab ini membatasi regulasi yang terbit ketika pilkada 2018 yang menggunakan UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota) dan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota).

Bukan hanya UU yang menjadi dasar hukum, Peraturan Bawaslu juga mutlak menjadi payung hukum untuk pelaksanaan yang lebih teknis terkait tata cara hingga materil gugatan yang disidangkan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Di bawah ini terdapat dua UU dan tiga peraturan bawaslu yang memuat penyelesaian sengketa proses pemilu. Penulis juga berupaya untuk mengelaborasi terkait dasar hukum yang berhubungan dengan penegakan keadilan pemilu tersebut.

a. Regulasi dalam Pilkada

1) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017

Aturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan pilkada secara umum dan penyelesaian sengketa secara khusus. Pasal 30 huruf c mengatakan Panwaslu Kabupaten/Kota “Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana”. Kemudian, Pasal 144 putusan Panwas bersifat mengikat Pasal 153 sengketa tata usaha negara.

Dalam memperjelas regulasi dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, maka dibuatlah aturan yang lebih menjelaskan pada ranah teknis beracara dalam proses penyelesaian sengketa, yaitu Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Perbawaslu tersebut lebih menekankan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara musyawarah dengan memanggil pemohon, termohon, dan pihak terkait. Musyawarah tersebut dibagi menjadi 2 jenis, yaitu musyawarah terbuka dan musyawarah tertutup. Dan keduanya wajib dihadiri oleh pemohon dan termohon.

2) Jenis Musyawarah Tertutup

Musyawarah tertutup merupakan musyawarah tertutup untuk umum. Musyawarah tertutup memiliki 8 prinsip yaitu: pimpinan musyawarah bersifat netral, para pihak tidak menyerang personal/pribadi, musyawarah bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan, musyawarah tidak mengenal kesepakatan untuk sebagian, pernyataan dan fakta dalam musyawarah tertutup tidak dapat menjadi menjadi alat bukti, kesepakatan para pihak tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesepakatan yang telah diambil para pihak dituangkan dalam acara dan selanjutnya menjadi materi pokok putusan penyelesaian sengketa, dan terakhir jika pihak tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa pemilihan dilanjutkan dengan proses musyawarah terbuka.

Dalam tahapannya, musyawarah jenis ini diawali dengan penyampaian permohonan pemohon dan kronologis permasalahan, perundingan kesepakatan, penyusunan kesepakatan pemohon dan termohon, penandatanganan berita acara musyawarah, dan penguangan berita acara musyawarah dalam putusan. Musyawarah ini harus dihadiri oleh pemohon dan termohon. Durasi musyawarah ini dilakukan selama 2 hari.

3) Jenis Musyawarah Terbuka

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pemohon dan termohon ketika akan melaksanakan musyawarah terbuka, yaitu sebagai berikut: penyampaian materi permohonan, penyampaian keterangan dan/atau tanggapan termohon dan/atau pihak terkait, pemeriksaan bukti, penyampaian kesimpulan pihak pemohon dan termohon, pembuatan kesepakatan, dan penetapan putusan penyelesaian sengketa.

Jika pemohon, termohon dan atau pihak terkait ingin didampingi atau diwakili oleh pengacara, wajib menyerahkan surat kuasa khusus dan memiliki izin bercara sebagaimana dimaksud dengan UU Advokat. Hal yang harus diperhatikan oleh pemohon adalah pemohon harus menyampaikan materi permohonan sengketa pada saat musyawarah pertama. Jika materi permohonan tidak lengkap maka pemohon diminta memperbaiki materi permohonan dan diserahkan pada musyawarah selanjutnya. Kemudian jika pemohon tidak menyampaikan perbaikan, musyawarah dilakukab dengan materi permohonan awal.

Dan yang harus diperhatikan oleh termohon adalah jawaban termohon diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan diampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Dibuat 4 rangkap yang juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* yang disampaikan dalam unit penyimpanan data. Selebihnya dalam musyawarah terbuka ini membahas mengenai poin utama yang disengketan oleh para pihak.

b. Regulasi dalam Pemilu

1) UU Nomor 7 Tahun 2017

UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 466 menyebutkan Sengketa proses Pemilu meliputi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dari keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pasal 468 ayat (1) menyebutkan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Jika tidak ada kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui adjudikasi.

Dasar hukum penyelesaian sengketa proses pemilu yang diemban oleh Bawaslu diatur dalam pasal 93 huruf b. Kemudian dalam 94 ayat (3) menjelaskan bahwa Bawaslu bertugas: menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; memverifikasi secara formal

dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

Untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota Bawaslu di setiap tingkat tersebut mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota kabupaten/kota. Tahapan adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, sama persis dengan proses persidangan pada umumnya. Mulai dari pembacaan permohonan, jawaban termohon, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan, dan putusan.

Kemudian dalam pasal 102 ayat (1) disebutkan dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota bertugas: mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Dikarenakan amanat dalam UU tersebut, Panwas Kabupaten/Kota berubah nomenklturnya menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Tidak hanya namanya yang berubah, kedudukan pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota bertransformasi menjadi suatu badan yang tetap seperti KPU kabupaten/kota dan memiliki kewenangan yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya.

Dalam kewenangannya memproses sengketa proses pemilu, Bawaslu di tingkat kabupaten/kota bertugas untuk melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa, kemudian melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 5 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: menerima Permohonan penyelesaian sengketa

proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dan dalam Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Hal ini menandakan adanya perbedaan redaksi dalam pasal yang terkait objek sengketa yang terdapat dalam regulasi Perbawalu Pilkada 2018 dan Perbawaslu Pemilu 2019.

Karena berbeda dengan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (PKPU Nomor 25 Tahun 2013). Penyelesaian sengketa berfokus pada surat keputusan dan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Purwakarta. Dalam kaitannya dengan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota hanya memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum yang bersifat wajib dijalankan. Dalam prosesnya dilakukan 2 cara yaitu Mediasi dan Adjudikasi.

3) Mediasi

Dalam Perbawaslu sebagaimana disebutkan di awal, mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak. Ketika beracara, apabila Pemohon dan/atau Termohon tidak menghadiri pemanggilan pertama, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali.

Bawaslu menjadi mediator para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Mediasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari dan dilaksanakan secara tertutup. Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dipimpin oleh paling sedikit 1 (satu) mediator.

Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: *Pertama*, pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembuka. *Kedua*, penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak. *Ketiga*, perundingan kesepakatan penyelesaian

sengketa proses Pemilu. *Keempat*, penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator. *Kelima*, dan penandatanganan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan.

Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan dalam Berita Acara Mediasi tercapai kesepakatan menggunakan formulir yang telah disediakan yang kemudian ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan mediasi. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu menuangkan dalam berita acara mediasi tidak tercapai kesepakatan formulir yang berbeda dan selanjutnya ditandatangani oleh Para Pihak dan Pimpinan Mediasi.

4) Adjudikasi

Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu melanjutkan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi. Adjudikasi dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 (tiga) anggota Bawaslu, terdiri atas 1 (satu) anggota Bawaslu sebagai ketua majelis sidang dan dibantu oleh 2 (dua) anggota Bawaslu sebagai anggota majelis sidang. Jadi Adjudikasi merupakan istilah lain dari persidangan, ketika mediasi yang sebelumnya digelar tidak mencapai kesepakatan.

Majelis sidang dibantu oleh tim Adjudikasi. Tim Adjudikasi sebagaimana dimaksud paling sedikit 4 (empat) orang Pegawai di Bawaslu, Bawaslu yang terdiri dari: 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang asisten Majelis Sidang, 1 (satu) orang notulen, dan 1 (satu) orang perisalah. Proses adjudikasi berupaya untuk menggali lebih dalam mengenai duduk perkara yang ada dengan melihat pokok permohonan dari pemohon dan jawaban termohon dengan masing-masing membawa alat bukti sebagai penguat argumentasi masing-masing.

2. Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2018: Putusan Rustandi dan Dikdik

Terkait perbedaan penyelesaian sengketa pilkada dan pemilu yakni pada pilkada, yaitu tidak terletak pada metode yang digunakan dalam hukum acara. Apabila dalam pemilu penyelesaian sengketa waktunya terhitung berdasarkan hari kerja, sementara untuk pilkada menggunakan hari kalender. Untuk pemilu putusannya final dan mengikat, sedangkan dalam pilkada putusannya hanya bersifat mengikat.

Sebagaimana sudah disebutkan di atas, ketika pada tahun 2018, nomenklatur lembaga penegak keadilan dalam penyelesaian sengketa masih menggunakan nama Panwaslu untuk tingkat Kabupaten/Kota. Sesuai apa yang tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016,

kewenangan Panwaslu lebih pada musyawarah yang kemudian bisa mengeluarkan sebuah putusan atas sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa peserta pemilihan dengan KPU.

Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah mengatur proses penyelesaian sengketa proses. Di dalam, pasal 4 dikatakan bahwa objek sengketa proses Pemilihan meliputi: a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan; dan/atau c. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota

Dalam hal sengketa yang diajukan pasangan Rustandi dan Dikdik, masuk kategori sengketa peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilu (KPU) karena mempersoalkan keputusan KPU Kabupaten Purwakarta. Perkara sengketa proses tersebut sesuai dengan peran Bawaslu dan/atau Panwas Kabupaten/Kota untuk menerima keberatan dari peserta Pilkada yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota. Peserta pilkada yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan tersebut hanya dalam jangka waktu paling lama tiga hari setelah KPU menetapkan putusan. Dalam hal ini Panwaslu ditegaskan sebagai pelaksana upaya banding administratif dimana peserta Pilkada diharuskan untuk mengajukan keberatannya kepada Panwaslu dalam urusan keputusan tata usaha pilkada. Baru setelah Bawaslu memberikan keputusan, namun calon atau peserta pilkada merasa kurang puas dapat diajukan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sudah selesai.

Secara kronologis, sengketa proses yang terjadi yaitu ketika pasangan Rustandi dan Dikdik sebagai pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang diajukan langsung kepada Panwaslu Kabupaten Purwakarta tanggal 13 Januari 2018 atau 2 (dua) hari setelah dikeluarkannya Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018.

Dalam upaya mendapatkan keadilan, pihak Rustandi dan Dikdik mengajukan permohonan kepada Panwaslu Kabupaten Purwakarta. Di bawah ini merupakan dalil

permohonan yang dilampirkan oleh keduanya. Adapun pokok permohonannya sebagai berikut:

- a. Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor: 03/PL.03.2- BA/3214/KPU-Kab/I/2018 yang dibuat pada Hari Kamis tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2018;
- b. Pengumuman KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 31/PL.03.2-Pu/3214/KPU Kab/1/2018 tentang Tanggapan Masyarakat Atas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, tertanggal 11 Januari 2018 yang menyatakan sebagai berikut:

Tabel 1
Pengumuman KPU Kabupaten Purwakarta

No	Nama Bakal Pasangan Calon	Pengusung/Parpol	Waktu Pendaftaran
1.	Bupati : H. ZAINAL ARIFIN, MT, IR, Wakil Bupati : LUTHFI, A.Md	Perseorangan	Senin, 08-01-2018 Pukul 14.10 WIB
2.	Bupati : HJ. ANNE RATNA MUSTIKA Wakil Bupati : H. AMING	Partai GOLKAR, PKB, NASDEM, HANURA, DEMOKRAT, PAN	Rabu, 10-01-2018 Pukul 10.00 WIB
3.	Bupati : Drs. H. FADLI KARSOMA, M.Si Wakil Bupati : ACEP MAMAN	PDIP, PPP	Rabu, 10-01-2018 Pukul 20.30 WIB

- c. Bahwa pemohon keberatan dengan terbitnya Berita Acara Pleno tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 dan Pengumuman KPU Kabupaten Purwakarta tentang Tanggapan Masyarakat atas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, sesuai dengan huruf a dan b di atas;
- d. Bahwa pemohon diusung oleh Koalisi Partai GERINDRA, HANURA dan PKS, yang disertai oleh Ketua dan Sekretaris beserta Pengurus DPC Partai GERINDRA Kabupaten Purwakarta, Pengurus DPP Partai HANURA, Pengurus DPD PKS Kabupaten Purwakarta, Ketua beserta Tim Sukses pada hari Rabu Tanggal 10 Januari

2018, Pada Pukul 22.00 WIB dan diterima oleh TERMOHON beserta Staf KPU Kabupaten Purwakarta dan dihadiri oleh Ketua PANWASLU Kabupaten Purwakarta dengan membawa seluruh Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon untuk mendaftarkan/didaftarkan sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta.

Setelah membaca permohonan yang diajukan, Majelis Musyawarah yang terdiri 3 orang memberikan pertimbangan hukum terkait hal tersebut. Berikut ini adalah permohonan yang diajukan oleh pemohon yang kemudian dijawab oleh majelis sebagai berikut: bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* menyatakan KPU telah salah menafsirkan atau setidaknya terlalu prematur atau salah menerapkan ketentuan Pasal 56 PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dengan Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Namun Majelis berpandangan lain, yang mengatakan bahwa tahapan penelitian syarat pencalonan sebagaimana angka 2 huruf f dalam tahap penyelenggaraan adalah dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 bukan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018. Jadi, dalil yang diajukan oleh pasangan Rustandi dan Dikdik gugur karena adanya perbedaan tanggal yang telah diatur dalam jadwal pendaftaran calon kepala daerah.

Kemudian, bahwa tentang dalil-dalil pemohon dan keterangan selama persidangan, pemohon mempermasalahkan tidak diterbitkannya berita acara mengenai tidak diterimanya pendaftaran pemohon. Dalam arti KPU Kabupaten Purwakarta tidak memberikan berkas yang menyatakan bahwa pencalonan Rustandi dan Dikdik ditolak atau diterima. Kejelasan secara tertulislah yang diinginkan oleh pasangan tersebut dari KPU.

Panwaslu Kabupaten Purwakarta menafsirkan kejadian yang dialami oleh pasangan Rustandi dan Dikdik sesungguhnya tidak diperlukan lagi penerbitan acara terhadap tidak diterimanya pendaftaran pemohon. Karena dengan adanya berita acara yang mengatakan penutupan pendaftaran, tidak ada kewajiban bagi KPU untuk membuat berita acara sebagaimana yang dimaksud oleh Rustandi dan Dikdik.

Yang lebih menjadi sorotan adalah mengenai terdapatnya dua rekomendasi dari Partai Hanura. Pasangan Anne Ratna Mustika dan Aming beserta Rustandi dan Dikdik yang

sama-sama direkomendasikan secara tertulis oleh Partai yang sama. Karena bagi Rustandi dan Dikdik, surat rekomendasi yang sah adalah surat kedua. Hal itu disebabkan karena surat rekomendasi untuk pasangan Anne dan Aming telah dicabut oleh Partai Hanura.

Melihat terjadinya dua rekomendasi oleh Partai Hanura kepada dua pasangan calon, maka Panwaslu Kabupaten Purwakarta berpandangan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura telah menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Partai Hanura Nomor SKEP/B/045/DPP-HANURA/I/2018 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta-Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 kepada Saudari Hj. Anne Ratna Mustika, SE, sebagai Calon Bupati dan Saudara H. Aming sebagai Calon Wakil Bupati yang dituangkan dalam Formulir Model B.1-KWK Parpol tertanggal 7 Januari 2016. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan: “Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi”.

Kemudian mengenai persyaratan adanya Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon Bupati dan Wakil Bupati dipertegas dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 39 ayat 3 huruf b dinyatakan: “Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat”. Bahwa terkait dengan pengertian ‘Pengurus Partai Politik tingkat Pusat’ sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016’ dikonsepsikan sebagai Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017.

Mengenai Pimpinan Partai Politik tingkat pusat diberi arti secara *expresis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yakni: “Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan. Maka dapat dikatakan, surat rekomendasi kedua yang ditujukan kepada pasangan Rustandi dan Dikdik tidak dapat diterima.

Proses persidangan tersebut sesungguhnya sudah melalui tahapan musyawarah tertutup dengan menghadirkan pemohon dan termohon. Namun dikarenakan tidak adanya kesepakatan bulat, maka proses dilakukan dengan cara musyawarah terbuka yang tetap menghadirkan pemohon dan termohon. Dengan ditolaknya seluruh permohonan pemohon, maka pasangan Rustandi dan Dikdik tidak dapat melanjutkan upayanya menjadi calon bupati dan wakil bupati Purwakarta periode 2018-2023.

Hasil dari pertimbangan Majelis Musyawarah Panwas Kabupaten Purwakarta tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada yaitu berupa dokumen dan keterangan pihak terkait. Persoalan pencalonan bupati dan wakil bupati Purwakarta yang menimbulkan sengketa melibatkan berbagai pihak dan Majelis berpendapat putusan yang disuguhkan adalah putusan yang adil bagi semua pihak.

3. Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2019: Putusan Caleg Partai PKB dan Caleg Partai Berkarya

Berbeda dengan dengan kasus yang terjadi pada pencalonan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Purwakarta, pada pemilu tahun 2019 terdapat sengketa dengan duduk perkara terkait pencoretan DCT anggota DPRD tingkat kabupaten. Mekanisme penyelesaian sengketa pilkada, berupa musyawarah yang berbeda dengan cara pemilu berupa Mediasi dan Adjudikasi (persidangan).

Penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, pertama dilakukan melalui proses Mediasi yaitu proses mempertemukan para pihak yang bersengketa oleh Pengawas Pemilu untuk mencapai kesepakatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka dilakukan Adjudikasi yaitu proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Alur perkara pencoretan dua nama anggota legislatif bernama Angga AR Ramadhana dan Lukmanul Hakim yang masing-masing bernaung di Partai PKB dan Partai Berkarya berawal

ketika dicoret dari keikutsertaannya sebagai calon legislatif tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Purwakarta. Mereka berdua dicabut dari DCT anggota DPRD Kabupaten Purwakarta oleh KPU Kabupaten Purwakarta berdasarkan surat nomor 81/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Alasan pencoretan tersebut dikarenakan KPU Kabupaten Purwakarta menilai adanya pemalsuan dokumen dalam keterangan persyaratan bakal calon legislatif. Mereka tidak menyatakan sebagai mantan narapidana sebagaimana aturan dalam PKPU pasal 7 ayat (1). Permohonan diajukan pada 19 Oktober 2018 dan diregister pada 23 Oktober 2018 oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta. Dengan memohon pembatalan keputusan KPU Kabupaten Purwakarta karena sudah melakukan pencoretan terhadap dua calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, kedua pemohon yang masing-masing diajukan oleh Partai PKB dan Partai Berkarya melampirkan bukti-bukti yang dapat memperkuat dalil permohonannya. Salah satu yang paling menonjol adalah mengenai bahwa calon yang dicoret tersebut tidak dihukum penjara lebih dari 5 (lima) tahun kurungan penjara sebagaimana yang tercantum dalam PKPU Nomor 31 Tahun 2018.

Sebagaimana keterangan dari saksi pemohon, bahwa memang dalam persiapan administratif pencalonan telah diketahui bahwa calon atas nama Angga pernah dihukum sebelum mendaftarkan ke KPU. Namun dikarenakan calon atas nama Angga dari Partai PKB ketika itu menerima hukumannya hanya 1 (satu) tahun, maka berdasarkan hasil konsultasi baik dari Lapas maupun Pengadilan ternyata tidak perlu dibuatkan keterangan pernah dihukum. Atas dasar tersebut, saksi memahami kalau terhadap ancaman hukuman yang kurang dari 5 (lima) tahun tidak perlu membuat suatu pengumuman sebagaimana disarutkan oleh KPU.

Sama halnya yang diajukan oleh pemohon atas nama Lukmanul Hakim dari Partai Berkarya, isi permohonan yaitu membatalkan pencoretan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta. Lukmanul Hakim memiliki catatan pernah menjadi mantan narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Hal itu berdasarkan pada salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta setelah dikonfirmasi oleh Termohon yaitu KPU Kabupaten

Purwakarta. Adanya ketidakbenaran dalam memberikan keterangan dalam dokumen SKCK, menjadi titik persamaan antara Angga dan Lukmanul. Lukmanul Hakim pun ketika dijatuhi hukuman oleh pengadilan tidak diancam penjara 5 (lima) tahun.

Alasan KPU Kabupaten Purwakarta sendiri karena menerima laporan melalui media sosial *WhatsApp* yang menerangkan bahwa ada calon Anggota DPRD yang sudah ditetapkan dalam DCT ada mantan narapidana narkoba yang tidak diumumkan ke masyarakat pada saat tahapan pendaftaran calon Anggota DPRD. KPU Kabupaten Purwakarta menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri, salinan putusan banding Pengadilan Tinggi Bandung, dan salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Yang intinya Pemohon telah memberikan keterangan tidak benar/palsu kepada Pengadilan Negeri Purwakarta. Dan ketika proses pemberkasaan bakal calon, kedua orang yang dicoret tersebut tidak mencentang (V) pada kolom “merupakan mantan narapidana”. KPU berpendapat bahwa ada ketidaksesuaian data yang dituliskan dengan fakta hukum yang ada.

Dalam PKPU Nomor 31 Tahun 2018 dikatakan bahwa “mantan narapidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup”. Calon yang dicoret KPU tersebut jelas tidak memberikan keterangan sesuai fakta hukum yang ada. Hal tersebut mengakibatkan kuatnya putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta untuk mencoret namanya dari DCT sesuai keputusan KPU Kabupaten Purwakarta.

Kemudian pertimbangan hukum selanjutnya adalah adanya pemalsuan SKCK pemohon tidak mengakui di dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan dari Pengadilan sehingga ada ketidakjujuran yang tidak sesuai dengan asas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebenarnya KPU sebelumnya tidak melakukan pencoretan setelah memanggil pemohon dalam rangka klarifikasi serta menyadari bahwa calon atas nama Angga dan Lukmanul Hakim tidak perlu dicoret karena hukuman yang diterimanya kurang dari 5 tahun. Namun mereka dicoret karena ketidakjujuran dalam memberikan keterangan dalam SKCK. Dalam surat itu menerangkan Angga dan Lukmanul bersih dari semua tindak pidana kejahatan. Sehingga itulah yang memberatkan mengapa putusan dari Bawaslu Kabupaten Purwakarta tetap mencoret kedua orang tersebut.

4. Upaya Bawaslu dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu

Proses pilkada dapat menjadi salah satu sarana integrasi bangsa untuk membiarkan masyarakat memilih sendiri kualitas pemimpin yang diinginkan. Pilkada adalah sistem untuk mengejewantahkan pemimpin idaman yang berasal dari masyarakat itu sendiri. (Sinaga, 2016:142-143). Selain itu pilkada juga dinilai dapat mengakomodir sistem seleksi terpadu untuk melahirkan calon kepala daerah yang berkualitas. (Prihatmoko, 2008:195-196). Mengingat makna penting pilkada itulah maka timbul urgensi untuk menjaga kualitas proses dari penyelenggaraan pilkada. Dengan kata lain, penyelenggaraan pilkada yang baik menjadi penentu kualitas pemerintahan dan keberhasilan demokrasi. (Suyanto, 2012:25). Perselisihan hasil pilkada merupakan salah satu dari beberapa masalah yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pilkada. Perbedaan penghitungan perolehan suara antara Komisi Pemilihan Umum dan peserta pilkada kerap terjadi dan berpotensi mencederai demokrasi. Sayangnya hingga kini masih belum jelas mengenai pengadilan mana yang dianggap cocok untuk mengadili perselisihan hasil pilkada pasca Mahkamah Konstitusi memutus pilkada bukan termasuk pemilihan umum.

Sedangkan pemilu dapat dimaknai menurut Harris G. Warren sebagaimana dikutip oleh Ramlan Surbakti, adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah (Surbakti, 1992:15). Dalam menggapai kekuasaan, ada tata cara, prosedur, dan mekanisme yang harus ditaati demi terjaganya keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Patuh pada rambu-rambu regulasi dapat mengantarkan seseorang atau partai politik menjadi pemimpin yang mengatur dalam sebuah pemerintahan yang ideal.

Terjadinya persoalan hukum yang muncul dalam Pilkada maupun Pemilu harus diproses oleh lembaga yang berwenang. Bawaslu memiliki kewenangan dalam hal tersebut, salah satunya adalah memutus penyelesaian sengketa baik antarpeserta pemilihan maupun peserta dengan penyelenggara dalam hal ini KPU. Sengketa yang muncul sebagaimana dipaparkan dengan melihat Putusan Bawaslu Kabupaten Purwakarta terhadap sengketa pasangan Rustandi dan Dikdik dengan KPU Kabupaten Purwakarta pada saat Pilkada tahun 2018, kemudian sengketa yang terjadi antara calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai PKB dan Partai Berkarya pada Pemilu tahun 2019.

Bagi Yulianto, secara filosofis, proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan proses mediasi dan selanjutnya apabila tidak tercapai dilakukan Adjudikasi; merupakan upaya perwujudan nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan sebagaimana yang tercantum dalam sila keempat Pancasila. Dikatakan demikian, karena tahap penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator, dalam istilah lain lain dapat diumpamakan dengan duduknya para pihak (bagian dari rakyat/musyawarah) yang bersengketa untuk bermusyawarah mencapai mufakat dengan dipimpin mediator dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. (Yulianto, 2019:9-8)

Dengan landasan filosofi yang berbeda, penyelesaian sengketa terkadang dipahami sama dengan pelanggaran pemilu pada umumnya. Terdapat perbedaan penyelesaian sengketa dengan pelanggaran administrasi. Hal tersebut dilihat dalam desain penegakan hukum pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang pemilu, setidaknya terdapat tiga jenis penegakkan hukum pemilu (*electoral law enforcement*), yaitu: (a) pelanggaran pemilu, yang terdiri dari pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran tindak pidana pemilu; (b) sengketa proses pemilu; (c) perselisihan hasil pemilu (Bagja & Dayanto, 2020:33).

Sebagaimana dipaparkan di awal bahwa sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ KPU Kota. Kedua jenis sengketa ini disebabkan oleh keluarnya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam penyelesaiannya, penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan melalui penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota (UU Pemilu, 2017). Dan apabila para pihak tidak dapat menerima putusan daripada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, maka para pihak dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan payung hukum yang diperkuat dalam pasal 17 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2015, Panwas Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang tidak mengandung unsur

tindak pidana. Alat bukti dalam penyelesaian sengketa bagi pemohon dan termohon dapat memperkuat argumentasi hukum dalam persidangan adjudikasi.

Sesuai dengan pasal 25, yaitu alat bukti salah satunya adalah surat keputusan KPU Kabupaten Purwakarta. Dengan dijadikan surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Purwakarta tentang penetapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, pasangan Rustandi dan Dikdik mengajukan permohonan kepada Panwas Kabupaten Purwakarta. Namun dari alat bukti itulah yang menjadikan Bawaslu Kabupaten Purwakarta memperkuat surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Purwakarta.

Sama halnya dengan dokumen surat keputusan, di dalam pasal 26 disebutkan juga bahwa alat bukti berupa keterangan para pihak pemohon dan termohon disampaikan dalam musyawarah penyelesaian sengketa. Keterangan saksi yang dihadirkan dalam sidang adjudikasi mengarah pada tidak absahnya pasangan Rustandi dan Dikdik karena tidak memenuhi persyaratan berupa surat rekomendasi dari partai politik. Di tambah waktu pengajuannya pun sudah melampaui batas yang sudah ditentukan dalam tahapan pendaftaran calon.

Gagalnya pasangan Rustandi dan Dikdik dalam pencalonannya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta tidak serta merta dapat dimaknai adanya hak yang direnggut oleh penyelenggara pemilu. Peranan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa antara pasangan tersebut dengan KPU sesungguhnya berpijak pada regulasi yang ada. Bawaslu tidak bersifat memihak kepada salah satu pihak.

Dalam perjalanannya, proses musyawarah dilakukan hingga keluarnya sebuah putusan akhir. Dengan mempertemukan para pihak lewat musyawarah tertutup dan terbuka yang didalamnya termasuk ada mediasi yang dilakukan oleh Majelis Musyawarah. Menurut Jimly Joses Sembiring, mengemukakan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. (Sembiring, 2011:27)

Proses Mediasi sudah dilakukan baik dalam kasus sengketa Pilkada tahun 2018 ataupun Pemilu tahun 2019. Mediasi secara etimologi, berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai hakim dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para

pihak. “Berada di tengah” juga bermakna hakim harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa. (Abbas, 2009:2)

Karena setelah melakukan Mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang dihadiri oleh para pihak tidak tercapai kesepakatan, maka proses penyelesaian sengketa proses pemilu dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Adjudikasi.

Tahapan adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, sama persis dengan proses persidangan pada umumnya. Mulai dari pembacaan permohonan, jawaban termohon, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan, dan putusan. Musyawarah secara tertutup dilakukan dengan tahapan penyampaian permohonan pemohon dan kronologis permasalahan, perundingan kesepakatan, penyusunan kesepakatan pemohon dan termohon, penandatanganan berita acara musyawarah, dan penguangan berita acara musyawarah dalam putusan.

Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa melalui musyawarah secara terbuka. Dalam tahapan ini, prosesnya sama pula dengan adjudikasi. Dapat diartikan, mekanisme musyawarah secara tertutup menunjukkan, bahwa Perbawaslu memberikan ruang yang lebih luas kepada pemohon dan termohon untuk mencapai kesepakatan.

Musyawarah terbuka merupakan musyawarah yang diadakan secara terbuka untuk umum. Musyawarah terbuka terjadi karena akibat tidak mencapainya mufakat dari musyawarah tertutup. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, secara tegas menyebut musyawarah mufakat sebagai sarana dalam penyelesaian sengketa.

Dalam Pilkada, Mekanisme penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan diatur pula secara jelas. Pasal 143 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menerangkan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa dengan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Akan tetapi, meskipun secara jelas menyebut musyawarah, ternyata tahapan yang dilakukan serupa dengan proses adjudikasi dalam Pemilu. Sama sekali tidak terlihat

musyawarah dalam arti sebenarnya, yaitu untuk mencapai mufakat. Dapat dikatakan, hanya sampulnya saja yang musyawarah, tapi di dalamnya berisi adjudikasi.

Apabila diamati maka desain penyelesaian sengketa proses yang ditegaskan sebagai sidang adjudikasi tersebut merupakan sebuah desain yang diletakkan dalam tahapan pemilu yang terus berjalan sehingga diharapkan ada *speedy trial* (peradilan cepat), dimana ketika ada soal yang diangkat oleh peserta pemilu dalam suatu tahapan, maka ada tuntutan untuk soal tersebut diselesaikan secara cepat, karena tahapan berikutnya sudah didepan mata. Kewenangan Bawaslu dalam sengketa proses lebih tepat disebut sebagai *emergency exit* (pintu darurat) atas persoalan antar peserta pemilu dan juga soal peserta pemilu dengan KPU.

Konteks persoalan yang berlangsung pada pencoretan calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tersebut berakar dari KPU yang menganggap ada kekeliruan dalam mengeluarkan surat keputusan akibat dari ketidakbenaran data yang diberikan oleh dua anggota calon Anggota DPRD Kabupaten.

Berdasarkan dua putusan yang dikeluarkan dalam perkara penolakan Rustandi dan Dikdik dalam pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta serta pencoretan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai PKB dan Partai Berkarya, upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam memutus sengketa proses pilkada dan pemilu sudah merupakan putusan yang tepat. Logika hukum yang disajikan dalam putusan merupakan hasil dari pertimbangan atas dalil permohonan yang dikonfrontasi dengan fakta dan data yang ada. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon bagi Majelis tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat membatalkan keputusan KPU terkait penetapan calon bupati dan wakil bupati serta pencoretan caleg dari Partai PKB dan Partai Berkarya.

D. SIMPULAN

Dari pemaparan atas dua putusan penyelesaian sengketa pada Pilkada Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta, maka dapat disimpulkan bahwa persoalan hukum yang diputus adalah semata-mata berdasarkan fakta hukum demi memperoleh sebuah keadilan bagi seluruh pihak. Dua kasus sengketa yang terjadi sama-sama terjadi dalam hal sengketa peserta pemilu dengan KPU Kabupaten Purwakarta. Dalam konteks pasangan Rustandi dan Dikdik, Panwaslu Kabupaten Purwakarta melihat dalam

kacamata kelengkapan dokumen yang tidak terpenuhi oleh pasangan tersebut dan soal waktu pendaftaran yang sudah habis.

Keabsahan data yang disajikan oleh kedua belah pihak membuat Panwas memberikan pertimbangan hukum untuk menolak permohonan salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati tersebut. Sedangkan dalam upaya mewujudkan keadilan pemilu ketika kasus pencoretan calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yaitu Angga dan Lukmanul hakim dari Partai PKB dan Partai Berkarya, Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat adanya ketidakbenaran data yang dibuat oleh dua calon tersebut sehingga Bawaslu membuat putusan untuk kembali menolak permohonan sengketa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriadi, Herry. “Implementasi UU No.7 Tahun 2017 terhadap Kedudukan dan Kinerja Panitia Pengawas PEMILU Kabupaten Hulu Sungai Utara”, *Jurnal Al’Adl*, Vol.X, No.1, Januari 2018.
- Hamimah, Siti, “Memperkuat Peran dan Fungsi BAWASLU dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum PEMILU”, *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol.4, No.3, 2018.
- Harun. Refly. “Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016.
- Paramansyah, H. A., SE, M., Husna, A. I. N., & Sos, S. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam*. Almuqstith Pustaka.
- Rahmat Bagja & Dayanto. 2020. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sembiring, Jimly Josep. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*. Jakarta: Visi Media.
- Solihin, W., Fauziah, N., & Mukti, S. (2021). Peran Agama dalam Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(2), 143-154.
- Suharyat, Y., Muttaqien, Z., Saady, A. F., Sofianiyatin, L., Ayuanti, R. N., Hendratmoko, S., ... & Diwyarthi, N. D. M. S. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Syarbaini, Syahril dkk. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Proyek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Y Witanto. 2011. *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Bandung: Alfabeta.
- Yulianto. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pemilu melalui Mediasi & Adjudikasi*. Bandung: Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Perundang-Undangan:

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati serta Walikota & Wakil Walikota.

Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Putusan:

Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor Register Permohonan: 01/PS/14/1/2018.

Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor Register Permohonan: 01/PS/BWSL.PWK.13.22/X/2018.

Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor Register Permohonan: 02/PS/BWSL.PWK.13.22/X/2018.